

PENTING NYA PENDAPATAN NASIONAL DALAM MENOPANG DEMOKRASI DI INDONESIA

Ami Kusumawati¹, Hendra Riofita²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: amykusumakusuma@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak – Pendapat nasional merupakan cerminan opini publik yang berperan penting dalam proses demokrasi. Di Indonesia, suara masyarakat terhadap isu-isu strategis menunjukkan dinamika keterlibatan warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini membahas pengertian pendapat nasional, peran strategisnya dalam pembentukan kebijakan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan pendapat nasional benar-benar representatif dan berdampak. Kajian ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Kata Kunci: Pendapatan Nasional, Demokrasi Indonesia.

Abstract – National opinion is a reflection of public opinion that plays an important role in the democratic process. In Indonesia, public voices on strategic issues show the dynamics of citizen involvement in national and state life. This article discusses the definition of national opinion, its strategic role in the formation of public policy, and the challenges faced in ensuring that national opinion is truly representative and impactful. This study is expected to strengthen public and government awareness in building a healthy and participatory democracy.

Keywords: National Income, Indonesian Democracy.

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Di Indonesia, prinsip ini tertuang dalam UUD 1945 dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Namun, demokrasi tidak hanya soal prosedur elektoral seperti pemilu, melainkan juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, pendapat nasional yakni opini, aspirasi, dan sikap kolektif warga negara terhadap isu-isu kenegaraan memegang peranan penting sebagai cerminan kehendak rakyat.

Partisipasi masyarakat melalui penyampaian pendapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Lebih dari itu, pendapat nasional juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas. Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, arus pendapat masyarakat berkembang sangat dinamis dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan publik.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam menjamin keberlangsungan sistem demokratis. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui pendapat nasional, yaitu aspirasi dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu kebangsaan yang berkembang. Pendapat nasional tidak hanya mencerminkan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan publik. Di tengah arus globalisasi informasi dan perkembangan teknologi digital, ruang untuk menyuarakan opini semakin luas dan beragam, sehingga memperkuat potensi masyarakat dalam mempengaruhi arah kebijakan negara. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi politik, kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, serta terbatasnya saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran pendapat nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendapat nasional dapat berfungsi secara efektif sebagai penopang demokrasi, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel di

Indonesia.

Keterlibatan warga negara dalam menyampaikan aspirasi menjadi salah satu pilar utama. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui pendapat nasional atau opini publik. Pendapat nasional mengacu pada agregasi pandangan, perasaan, dan sikap masyarakat terhadap isu-isu penting dalam kehidupan berbangsa. Di Indonesia, keberagaman latar belakang masyarakat menjadikan pendapat nasional sebagai elemen yang kompleks, tetapi sangat vital dalam membentuk kebijakan yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan survei opini publik, serta berita dari media daring yang relevan dengan topik pendapat nasional dan demokrasi di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi peran, tantangan, dan sarana penyaluran pendapat nasional dalam konteks demokrasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendapat Nasional

Pendapat nasional adalah cerminan dari opini kolektif warga negara mengenai isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sedang berkembang. Pendapat ini terbentuk dari interaksi masyarakat dengan media, pengalaman sosial, dan nilai-nilai budaya yang dianut.

2. Peran Strategis Pendapat Nasional

- Sebagai Dasar Kebijakan Publik: Pemerintah yang demokratis idealnya menyerap aspirasi publik sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan. Pendapat nasional menjadi acuan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Mengawasi Jalannya Pemerintahan: Melalui media massa, survei, dan partisipasi langsung, masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja pemerintah, sehingga tercipta akuntabilitas.
- Mendorong Perubahan Sosial: Ketika pendapat nasional menunjukkan penolakan terhadap suatu kebijakan atau kondisi sosial, hal ini bisa menjadi pendorong terjadinya perubahan yang lebih baik.

3. Sarana Penyaluran Pendapat Nasional:

- Media Massa dan Media Sosial: Menjadi alat paling efektif dalam menyuarakan opini publik. Namun, penyalahgunaan informasi juga menjadi tantangan serius.
- Survei Opini Publik: Dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, survei membantu menangkap gambaran umum sikap masyarakat terhadap isu tertentu.
- Forum Warga dan Musyawarah: Sebagai bentuk demokrasi langsung di tingkat lokal yang penting dalam menjangkau pendapat masyarakat akar rumput.

4. Tantangan dalam Menyalurkan Pendapat Nasional

- Kurangnya Literasi Politik: Banyak masyarakat belum memahami hak dan cara menyampaikan pendapat secara efektif.
- Dominasi Kelompok Tertentu: Opini dari kelompok yang lebih vokal sering kali mendominasi, sehingga mengaburkan suara mayoritas.
- Disinformasi dan Polarisasi: Penyebaran informasi palsu dapat memengaruhi pendapat publik secara negatif dan menciptakan perpecahan.

5. Upaya Penguatan Peran Pendapat Nasional

- Meningkatkan Pendidikan Kewarganegaraan: Literasi politik perlu ditingkatkan sejak dini agar masyarakat mampu berpikir kritis.
- Mendorong Transparansi Pemerintah: Pemerintah harus membuka akses informasi publik yang relevan dan akurat.

- Mengembangkan Platform Partisipasi Digital: Teknologi digital dapat dijadikan sarana penyaluran aspirasi yang efektif, jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa pendapat nasional telah memainkan peran signifikan dalam beberapa isu demokratis di Indonesia, seperti penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dukungan terhadap pemilihan langsung kepala daerah, dan sikap publik terhadap transparansi anggaran pemerintah. Masyarakat Indonesia menunjukkan kesadaran politik yang semakin meningkat, terutama melalui penggunaan media sosial sebagai saluran ekspresi. Namun, tantangan berupa hoaks, manipulasi opini, dan rendahnya literasi politik masih menjadi hambatan utama. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media dalam menciptakan ekosistem opini publik yang sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat nasional telah memainkan peran signifikan dalam beberapa isu demokratis di Indonesia, seperti penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dukungan terhadap pemilihan langsung kepala daerah, dan sikap publik terhadap transparansi anggaran pemerintah. Masyarakat Indonesia menunjukkan kesadaran politik yang semakin meningkat, terutama melalui penggunaan media sosial sebagai saluran ekspresi. Namun, tantangan berupa hoaks, manipulasi opini, dan rendahnya literasi politik masih menjadi hambatan utama. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media dalam menciptakan ekosistem opini publik yang sehat. pendapat nasional memiliki peran yang sangat vital dalam menopang keberlangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui penyampaian opini, aspirasi, serta sikap masyarakat terhadap isu-isu kenegaraan, rakyat dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Pendapat nasional tidak hanya menjadi bentuk partisipasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Namun, efektivitas peran ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi politik, minimnya edukasi demokrasi, dan terbatasnya ruang partisipasi publik yang inklusif. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik, perluasan akses informasi yang berkualitas, serta penyediaan wadah yang aman dan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Opini Publik dan Demokrasi*.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik di Indonesia: Proses dan Tantangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Judul Artikel ... (Putra, Murtinasari)
- Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 2(1), 29–48.
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151.
- Setiawan, D. (2022). *Demokrasi Digital dan Partisipasi Politik*. Bandung: Pustaka Aksara.
- Kominfo RI. (2023). *Laporan Tahunan Literasi Digital Nasional*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Santoso, B. (2020). *Media Sosial dan Perubahan Opini Publik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.